Inklusivitas Perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022: Pendekatan Model Miyazawa

Ahmadi Murjani[1)*], Akhmad Rifani[2)], Muhammad Febrian Rizky Ramadhan[3)],
[1) 2) 3)] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

[*] E-mail corresponding author: amurjani@bps.go.id

Ecoplan

Submitted: Feb 24, 2024
Accepted: Apr 1, 2024
Published: Apr 30, 2024

Abstract *- One of the goals and missions of achieving sustainable development is implementing economic development that adheres to the principle of inclusivity. Therefore, policymakers in a region must identify whether the economic development undertaken is already inclusive. Following these results, it is essential for policymakers to also conduct evaluations to determine the effectiveness of the policies made in realizing inclusive economic development. These two aspects can be addressed by applying the Miyazawa Input-Output Table. Meanwhile, over the past three years, Hulu Sungai Utara Regency has experienced a range of economic and social phenomena that necessitate further study of economic inclusivity. As a result of these conditions, the Regency has been selected as the locus for this research. The findings on the economic inclusivity in this Regency are expected to serve as a reference for policy in developing the economy of Hulu Sungai Utara. Based on the results, it is known that the economy in Hulu Sungai Utara Regency has not yet been fully inclusive. Investments in sector code E (Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling), sector code A (Agriculture, Forestry, and Fishery), sector code C (Manufacturing Industry), and sector code J (Information and Communication) have the potential to increase the welfare of low-income communities, which would then yield an inclusive economic development in the area.*

Keywords: ***Input Output Table; Miyazawa; Inclusive; South Kalimantan; Hulu Sungai Utara.***

Abstrak - Salah satu target serta misi agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan pembangunan ekonomi yang memperhatikan asas inklusivitas. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan di suatu wilayah untuk dapat mengidentifikasi apakah pembangunan ekonomi yang telah dilakukan sudah inklusif. Kemudian dari hasil tersebut, tentunya pengambil kebijakan juga perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah dibuat dalam mewujudkan terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif. Dua hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pemodelan Tabel Input-Output model Miyazawa. Di sisi lain, Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tiga tahun terakhir mengalami serangkaian fenomena ekonomi dan sosial yang memerlukan pengkajian inklusivitas ekonomi yang lebih lanjut. Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, Kabupaten ini dipilih sebagai lokus penelitian. Hasil pengkajian inklusivitas ekonomi terhadap Kabupaten ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi kebijakan dalam membangun perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan temuan yang didapatkan, diketahui bahwa perekonomian di Hulu Sungai Utara belum bisa dikatakan sepenuhnya inklusif. Investasi di sektor kode E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), sektor kode A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), sektor kode C (Industri Pengolahan), dan sektor kode J (Informasi dan Komunikasi) berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan rendah di Hulu Sungai Utara, yang kemudian mewujudkan terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Tabel Input Output; Miyazawa; Inklusif; Kalimantan Selatan; Hulu Sungai Utara.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan dalam bidang ekonomi akan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi modal utama bagi penciptaan lapangan kerja yang baru dan membuka kesempatan untuk menciptakan peluang ekonomi di masa yang akan datang. Kemajuan sektor ekonomi suatu daerah, tentunya akan berhubungan dengan aspek lain seperti kesempatan kerja, tingkat pengangguran, laju inflasi, kemiskinan, hingga pembangunan manusia di suatu daerah (Murjani, 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup penting di Kalimantan Selatan, karena tenaga kerja yang terserap pada sektor ini terbilang besar, yakni sekitar 30,13 persen. Ini berarti hampir sepertiga penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan ditampung pada sektor pertanian (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023b). Dilihat dari sisi PDRBnya, sektor pertanian memberikan sumbangsih sebesar 11,40 persen (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023b). Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Kalimantan Selatan setelah sektor Pertambangan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki pola perekonomian yang sedikit berbeda di Kalimantan Selatan. Sektor Pertanian menjadi sektor utama penyumbang perekonomian Hulu Sungai Utara yakni sekitar 15,99 persen (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023c). Dilihat menurut sumbangannya di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan *share* sebesar 2,29 persen bagi perekonomian Kalimantan Selatan (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023b).

Dilihat dari kacamata sosial, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki keunikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, yakni pada posisi 4,80 persen pada Agustus 2021, menjadi 3,85 persen pada Agustus 2023. Dilihat menurut angka kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu sungai Utara merupakan yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Meskipun terus mengalami *trend* penurunan setiap tahunnya, namun angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menyentuh angka di atas 6 persen pada bulan Maret 2023 (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023b).

Satu indikator lain yang bisa dilihat pada aspek sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu Kabupaten terendah di Kalimantan Selatan dalam pengukuran IPM. Pada tahun 2023, IPM di Hulu Sungai Utara berada pada angka 71,12, yang menempatkan Kabupaten tersebut sebagai Kabupaten dengan angka IPM terendah kedua di Provinsi Kalimantan Selatan (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023a). Dilihat dari fenomena ekonomi dan sosial yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menimbulkan suatu pertanyaan, apakah dinamika ekonomi di Hulu Sungai Utara sudah dinikmati oleh semua masyarakat luas. Dengan kata lain bagaimana dampak pembangunan ekonomi di Hulu Sungai Utara terhadap distribusi pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyentuh pada bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah gerakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memenuhi syarat-syarat pembangunan ekonomi yang inklusif, serta dapat menerapkan pemerataan pembangunan sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Inklusivitas menurut Klasifikasi Bank Dunia

Klasifikasi tingkat inklusivitas ekonomi akibat dari dampak peningkatan permintaan akhir mengacu pada pengklasifikasian Bank Dunia dalam pengkategorian tingkat kesenjangan pendapatan, di mana tingkat ketimpangan diklasifikasikan sebagai ketimpangan tinggi jika *share* kelompok 40 persen bawah bernilai di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika bernilai di antara 12 – 17 persen, dan ketimpangan rendah apabila bernilai di atas 17 persen. Berdasarkan klasifikasi tersebut, apabila dampak dari peningkatan permintaan akhir terhadap sektor-sektor penopang perekonomian menghasilkan distribusi pendapatan dengan ketimpangan yang rendah,

maka pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut dapat dinyatakan sudah inklusif (BPS, 2023).

Tabel Input-Output

Tabel Input-Output merupakan tabel yang berisikan informasi mengenai transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi yang ditampilkan dalam bentuk matriks baris dan kolom. Setiap baris menampilkan alokasi output, sedangkan setiap kolom merepresentasikan pemakaian input dalam suatu proses produksi. Setiap sel dari baris dan kolom tersebut menunjukkan nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi. Nilai yang tertera dalam sel menunjukkan jumlah atau nilai dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu sektor (baris) dan digunakan oleh sektor lain (kolom) dalam proses produksi.

Dalam pembuatan tabel input-output, terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi. Asumsi pertama adalah asumsi homogenitas, di mana setiap sektor hanya memproduksi satu jenis barang atau jasa dengan susunan input yang seragam dan tidak ada substitusi terhadap input dari output sektor lain. Asumsi kedua adalah proporsionalitas, yang berarti kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input sektor itu sendiri. Asumsi yang ketiga adalah additivitas, yaitu total efek dari kegiatan produksi di berbagai sektor adalah hasil penjumlahan dari efek kegiatan masing-masing sektor yang terpisah (BPS, 2021).

Tabel Input-Output Model Miyazawa

Tabel Input-Output model Miyazawa yang diperkenalkan pada tahun 1968 adalah hasil pengembangan dari konsep tabel input-output standar. Dalam model Miyazawa, elemen-elemen seperti upah atau gaji, surplus dari kegiatan usaha, dan pola konsumsi rumah tangga dapat dilihat berdasarkan masing-masing tingkatan pendapatan. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana pendapatan didistribusikan pada berbagai sektor ekonomi. Hal tersebut memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak yang dihasilkan oleh perubahan permintaan akhir terhadap distribusi pendapatan.

Lebih lanjut, model Miyazawa memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif bagaimana perubahan dalam konsumsi, investasi, ekspor, atau kebijakan belanja pemerintah dapat memberikan dampak yang bervariasi pada berbagai kelompok pendapatan. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, model Miyazawa dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat menengah ke bawah (Miyazawa, 1968). Dengan memberikan investasi secara spesifik pada sektor-sektor tersebut, diharapkan pendapatan masyarakat yang tercakup di strata ekonomi menengah ke bawah dapat meningkat dan menurunkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara strata sosial, atau dengan kata lain, penerapan pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek inklusivitas menjadi terpenuhi.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pentingnya menciptakan ekonomi yang inklusif telah secara komprehensif dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu. Perekonomian yang inklusif bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi dalam mengekspansi perekonomian di suatu wilayah. Perekonomian yang inklusif juga berperan besar dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menghentikan ketidaksetaraan berkepanjangan (Sternfels, 2021). Jawaban dari pentingnya ekonomi yang inklusif secara garis besar telah terjawab di penelitian-penelitian terdahulu. Adapun topik lanjutan yang menarik untuk dibahas lebih dalam pada tema inklusivitas ekonomi adalah bagaimana cara mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif itu sendiri.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, ditemukan bahwa pada umumnya kajian-kajian terdahulu cenderung berupaya mengetahui pengaruh suatu sektor ekonomi terhadap distribusi pendapatan, yang kemudian sektor ekonomi tersebut digunakan peneliti sebagai instrumen atau media kebijakan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Contohnya, analisis untuk mengetahui pengaruh investasi dan pembangunan sektor Perkebunan (Hardiwan et al., 2019), Industri Pengolahan (Dimas dan Neli, 2022), sektor Pariwisata (Adyaharjanti dan Hartono, 2020), sektor Informasi dan Komunikasi (Imansyah et al., 2023) dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga atau masyarakat yang berpendapatan rendah. Selain itu, terdapat pula kajian yang melibatkan lebih dari satu sektor berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya peran sektor-sektor

ekonomi yang bersifat *labour-intensive* (sektor ekonomi yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar) dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga yang berpendapatan rendah (Alberti et al., 2023).

Di sisi lain, ditemukan pula kajian-kajian terdahulu yang menggunakan pendekatan metode analisis selain pemodelan Tabel Input Output model Miyazawa dalam menjelaskan peran sektor ekonomi terhadap pendapatan masyarakat maupun sebaliknya (Edinak et al., 2022; Saari et al., 2014). Terdapat pula ditemukan penelitian-penelitian yang berupaya mengidentifikasi pengaruh dari beberapa variabel sosial dan ekonomi terhadap inklusivitas ekonomi dengan pendekatan analisis deret waktu. Adapun variabel-variabel yang memiliki andil dalam membantu terciptanya ekonomi yang inklusif adalah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan (Afriliana dan Wahyudi, 2022; Doumbia, 2019; Iskandar, 2016; Purwanti dan Rahmawati, 2021; Sri Hartati, 2021), Penanaman Modal Asing (Afriliana dan Wahyudi, 2022; Hidayat et al., 2020; Nehemia dan Prasetyia, 2023), Penanaman Modal Dalam Negeri (Hidayat et al., 2020; Nehemia dan Prasetyia, 2023), Angka Partisipasi Sekolah (Dyah Hapsari et al., 2018), Lama Sekolah (Hidayat et al., 2020), Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan (Alekhina dan Ganelli, 2023), Redistribusi Fiskal (Alekhina dan Ganelli, 2023), Ekspor Barang/Jasa (Hidayat et al., 2020), Pembangunan sektor Finansial (Doumbia, 2019), dan Infrastruktur (Afriyana et al., 2023; Dimas dan Neli, 2022; Doumbia, 2019).

Dari telaah pustaka juga ditemukan bahwa terdapat berbagai kebijakan yang relevan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif. Contohnya kebijakan pasar kerja, program perlindungan sosial, dan inklusi finansial dapat membantu terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif (Agénor, 2017). Selain itu, kebijakan yang mendukung anak muda dalam berperan aktif sebagai pelaku ekonomi dalam bidang penyediaan barang dan jasa juga memberikan pengaruh yang signifikan (Varsha Pramod dan Ramachandran, 2023).

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih cenderung berfokus pada pengaruh suatu sektor ekonomi tertentu terhadap distribusi pendapatan, seperti Perkebunan, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan sektor Informasi dan Komunikasi. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak memilih secara spesifik suatu sektor ekonomi dan menganalisis keterkaitannya terhadap inklusivitas ekonomi atau pada pendekatan penelitian ini menganalisis pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat 40 persen bawah, melainkan dengan menggunakan keterkaitan antar sektor ekonomi yang tertuang di tabel input-output untuk mengetahui sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap pendapatan 40 persen bawah. Dengan kata lain, sektor tersebut tidak dipilih berdasarkan preferensi dalam bentuk apapun, melainkan dengan proses analisis pada tabel input-output dari lokus penelitian yang digunakan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini berperan penting dalam memahami bagaimana dampak dari dinamika ekonomi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Pendekatan analisis ini tidak hanya menampilkan sektor kunci ekonomi dan interaksi di antara mereka, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana peningkatan permintaan akhir pada perekonomian mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dengan memfokuskan pada aspek distribusi pendapatan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan terlaksananya aspek inklusivitas dalam pembangunan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Terdapat tiga jenis data yang digunakan dalam melakukan pemodelan tabel input-output model Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022. Tiga jenis data tersebut yaitu data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 dan tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2016 versi 17 lapangan usaha (dengan satuan nilai yang digunakan adalah miliar rupiah).

Tahapan pertama dalam pengolahan data dimulai dengan melakukan pemutakhiran (*updating*) terhadap tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 agar diubah menjadi tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, dengan memanfaatkan metode RAS (Miller dan Blair, 2009). Setelah tabel input-output Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 didapatkan, maka dilakukan regionalisasi terhadap tabel tersebut untuk mendapatkan tabel input-output Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022. Adapun metode yang digunakan dalam tahapan regionalisasi adalah metode SLQ (*Simple Location-Quotient*). Metode SLQ digunakan untuk mengestimasi koefisien input regional berdasarkan nilai-nilai LQ (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Berikut merupakan persamaan Metode SLQ:

$$LQ_i = \frac{x_i/x_t}{X_i/X_t} \quad (1)$$

di mana x_i adalah nilai output sektor i untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara dan x_t adalah nilai total output Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan pada bagian penimbang, X_i adalah nilai output sektor i Provinsi Kalimantan Selatan dan x_t adalah nilai output total Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai output Kabupaten Hulu Sungai Utara diestimasi menggunakan rasio produk domestik regional bruto (PDRB) lapangan usaha Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku tahun 2022 terhadap total PDRB lapangan usaha Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2022. Untuk pembuatan komponen permintaan akhir (*final demand*) Kabupaten Hulu Sungai Utara, digunakan data PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022. Setelah nilai LQ diketahui, maka besaran koefisien input Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditentukan, yaitu dengan persamaan sebagai berikut:

$$a_{ij}^{HSU} = a_{ij}^{KALSEL}.LQ_i \quad \text{untuk } LQ_i < 1 \quad (2)$$

$$a_{ij}^{HSU} = a_{ij}^{KALSEL} \quad \text{untuk } LQ_i \geq 1 \quad (3)$$

di mana a adalah koefisien input, HSU adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, $KALSEL$ adalah Provinsi Kalimantan Selatan, serta i, j adalah sektor i dan j. Estimasi koefisien teknis tersebut dapat dilakukan terhadap komponen lainnya di dalam tabel input-output, tidak terbatas pada komponen input antara saja (Miller dan Blair, 2009). Setelah mencapai tahap ini, analisis sektor kunci dapat dilakukan terhadap tabel yang terbentuk, yaitu terhadap tabel input-output yang sudah mengalami regionalisasi menjadi tabel input-output Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022.

Dengan adanya tabel tersebut pula, maka pemodelan tabel input-output model Miyazawa sudah dapat dilakukan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa, salah satu keunggulan tabel input-output model Miyazawa dibandingkan dengan tabel input-output standar adalah kemampuan model tersebut dalam menggambarkan dampak distribusional terhadap kelompok pengeluaran, ketika terdapat perubahan pada permintaan akhir. Hal ini dapat digunakan untuk melihat simulasi dampak dari investasi yang dilakukan pada sektor-sektor tertentu terhadap kenaikan pendapatan (upah/gaji) pada setiap kelompok pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan perluasan kelompok pendapatan pada komponen input primer upah/gaji dan kelompok pengeluaran komponen konsumsi pada permintaan akhir. Setelah didapatkan perluasan kelompok pengeluaran dan pendapatan pada konsumsi dan upah/gaji, maka konsumsi dan upah/gaji tersebut dimasukkan ke dalam matriks input antara.

Perluasan kelompok pengeluaran menggunakan data SUSENAS Provinsi Kalimantan Selatan, yang disaring menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dilakukan pemetaan terhadap konsumsi makanan dan bukan makanan berdasarkan kategori lapangan usaha dengan bantuan tabel pemetaan *The Classification of Individual Consumption According to Purpose* (*COICOP*) ke dalam *Classification of Products by Activity* (*CPA*). Setelah dilakukan pemetaan konsumsi rumah tangga ke dalam 17 lapangan usaha, maka selanjutnya dilakukan pengelompokkan kelompok pengeluaran perkapita pada data SUSENAS ke dalam klasifikasi Bank Dunia, yaitu 40 persen terendah (*Bottom 40%*), 40% persen menengah (*Middle 40%*), dan 20 persen teratas (*Top*

20%) di setiap lapangan usaha. Rasio setiap kelompok pengeluaran per lapangan usaha terhadap total per lapangan usaha akan dikalikan dengan total konsumsi per lapangan usaha dengan maksud memecah pengeluaran per sektor menjadi tiga kelompok pengeluaran.

Pengelompokkan ini juga dilakukan pada data SAKERNAS 2022, yaitu dengan menggunakan variabel upah/gaji dan lapangan usaha. Di dalam proses penggabungan kelompok pengeluaran dan upah/gaji ke dalam tabel input-output Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022, dilakukan proses penyeimbangan baris dan kolom (*balancing*). Hal ini dikarenakan perbedaan total konsumsi dan upah/gaji dari tiga pengeluaran tersebut yang berasal dari dua survei yang berbeda, yakni SUSENAS dan SAKERNAS. Setelah tabel input-output Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022 sudah seimbang, maka bisa dilakukan analisis dampak terhadap distribusi pengeluaran.

Analisis Sektor Kunci dengan Model Input-Output Standar

Analisis sektor kunci memerlukan dua indeks penting, yaitu Indeks *Forward Linkage* (IFL) dan Indeks *Backward Linkage* (IBL). Suatu sektor akan diidentifikasi sebagai sektor kunci apabila memiliki IFL dan IBL lebih besar dari 1 (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Untuk mendapatkan nilai IFL dan IBL melalui tabel input-output standar, digunakan operasi matriks yang dapat diuraikan sebagai berikut:

$$X = (I - A)^{-1}F \tag{4}$$

di mana X matriks total output (berukuran n sektor × 1), I adalah matriks identitas (berukuran n × n sektor), F adalah matriks permintaan akhir (berukuran n sektor × 1), dan A adalah matriks koefisien input/teknis (berukuran n × n) yang didapatkan dari rasio input antara dengan total input. Komponen $(I - A)^{-1}$ merupakan Matriks Kebalikan Leontief yang biasa disebut matriks pengganda output (*output multiplier matrix*). Pada penelitian ini, Matriks Kebalikan Leontief yang digunakan adalah tipe terbuka, di mana fokus sektor yang dianalisis adalah 17 sektor lapangan usaha yang ditujukan untuk mendapatkan nilai IBL dan IFL dari 17 sektor lapangan usaha tersebut.

Jika $G = (I - A)^{-1}$, maka IFL dan IBL dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut:

$$IFL_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} g_{ij}}{1/n \sum_i \sum_j g_{ij}}, \tag{5}$$

dan

$$IBL_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_{ij}}{1/n \sum_i \sum_j g_{ij}} \tag{6}$$

di mana IBL_j merupakan Indeks *Backward-Linkage* sektor ke j (posisi kolom pada tabel input-output), IFL_i merupakan Indeks *Forward-Linkage* sektor ke i (posisi baris pada tabel input-output), dan g_{ij} merupakan komponen/isi dari matriks G. Suatu sektor yang memiliki nilai IBL dan IFL lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu merangsang sekaligus memenuhi permintaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sektor lainnya, yang dalam hal ini disebut dengan sektor kunci (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Selain itu, sektor yang memiliki nilai IBL lebih dari 1 cenderung lebih banyak membeli output dari sektor lain sebagai inputnya, sektor tersebut disebut sebagai sektor yang berorientasi hulu pada penelitian ini. Sebaliknya, jika nilai IFL dari suatu sektor lebih dari 1, maka sektor ini akan lebih cenderung menjual output ke sektor lain sebagai input sektor lain tersebut, dimaknai sebagai sektor hilir. Identifikasi sektor kunci, hulu maupun hilir bisa digambarkan sebagai grafik 4 kuadran dengan sumbu persinggungan 1 pada IFL dan IBL. Sektor yang bukan sektor kunci, hulu, dan hilir

diklasifikasikan sebagai sektor yang tidak berpengaruh signifikan pada perekonomian suatu wilayah (memiliki nilai IFL dan IBL kurang dari 1).

Model Input-Output Miyazawa

Pemodelan tabel input-output model Miyazawa mengasumsikan bahwa komponen pendapatan (upah/gaji) dan konsumsi merupakan bagian dari komponen input antara (*endogenous*), sehingga pada proses pemodelannya, dilakukan pemindahan kolom konsumsi dan baris upah/gaji ke dalam matriks input antara. Perbedaan lainnya dengan tabel input-output standar adalah dilakukannya pemisahan konsumsi dan upah gaji menurut kelompok tertentu (pada penelitian ini menggunakan klasifikasi Bank Dunia, yaitu pengelompokkan 40 persen terendah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas). Berikut merupakan model input-output Miyazawa (1968) dalam pendekatan matriks:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A_{n\times n} & C_{n\times q} \\ V_{q\times n} & 0_{q\times q} \end{bmatrix} \tag{7}$$

di mana $\bar{A}$ merupakan Matriks Koefisien Augmentasi Miyazawa, A adalah Matriks Koefisien Teknis berdimensi $n \times n$ sektor, C merupakan Matriks Koefisien Konsumsi Rumah Tangga berdimensi $n \times q$ (sektor × kelompok distribusi pengeluaran), V menunjukkan Matriks Koefisien Pendapatan Rumah Tangga berdimensi $q \times n$ (kelompok pendapatan × sektor), dan 0 adalah matriks berisi nilai 0 berdimensi $q \times q$. Matriks kebalikan Leontief dibutuhkan untuk merepresentasikan efek dari dampak perubahan permintaan akhir terhadap kelompok pendapatan pada sektor-sektor perekonomian. Matriks ini bertindak sebagai pengganda terhadap pendapatan sektoral dan rumah tangga. Bentuk matriks kebalikan Leontief untuk Matriks Koefisien Augmentasi Miyazawa pada Persamaan (7) adalah sebagai berikut:

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} (I - A) & -C \\ -V & I \end{bmatrix}^{-1} \tag{8}$$

jika $B = (I - A)^{-1}$, $L = VBC$, dan $K = (I - L)^{-1}$ maka $\bar{B}$ bisa dituliskan

$$\bar{B} = (I - \bar{A})^{-1} = \begin{bmatrix} B(I + CKVB)_{n\times n} & BCK_{n\times q} \\ KVB_{q\times n} & K_{q\times q} \end{bmatrix} \tag{9}$$

di mana KVB bertindak sebagai *Multi-sector Income Multiplier Matrix* atau dengan sebutan lain, yaitu Matriks *Multiplier of Income Formation* (yang disingkat menjadi matriks MIF). Matriks MIF digunakan untuk menjelaskan dampak kenaikan setiap unit permintaan akhir pada suatu sektor terhadap pendapatan pada masing-masing kelompok, baik berupa dampak langsung maupun tidak langsung. Dari matriks tersebut, maka analisis untuk menjelaskan dampak permintaan akhir sektor-sektor perekonomian terhadap distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 dapat dilakukan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, berikut ditampilkan kerangka kerja analisis tabel input-output model Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022.

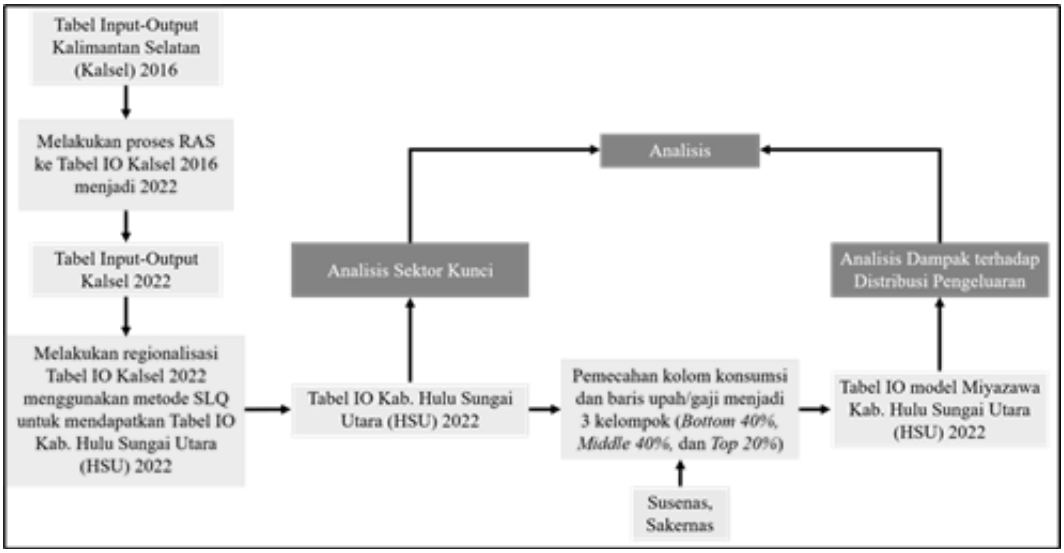

Sumber: Ilustrasi penulis.

Gambar 1. Kerangka Kerja Analisis Tabel Input-Output Model Miyazawa Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (2023c), perekonomian di Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang besarannya mencapai 15,99 persen dari total PDRB Hulu Sungai Utara. Namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi sektor ini cenderung mengalami penurunan. Contohnya jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai proporsi sebesar 17,35 persen, *share* sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan sekitar 1,36 persen poin. Hal ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya *share* sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2022 mencapai 15,57 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 14,70 persen. Dengan selisih kontribusi yang semakin tidak berbeda jauh, menunjukkan adanya potensi perubahan struktur perekonomian khususnya sektor penopang utama di Hulu Sungai Utara pada masa yang akan datang.

Jika dilihat berdasarkan peringkat *share* PDRB tahun 2022, perekonomian Hulu Sungai Utara ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,99 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,57 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,57 persen), dan Konstruksi (10,84 persen). Yang mana sektor-sektor di atas memiliki peranan setidaknya 10 persen dari total perekonomian dan jika digabungkan memiliki total sebesar 53,97 persen atau melebihi setengah dari perekonomian di Hulu Sungai Utara. Selain itu ada pula sektor-sektor yang memiliki *share* mendekati 10 persen yaitu sektor Jasa Pendidikan (9,48 persen) dan sektor Industri Pengolahan (9,22 persen) (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023a). Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di Hulu Sungai Utara sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor tersebut atau di sini disebut dengan sektor penopang.

Sektor Kunci di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Meskipun sektor-sektor penopang sangat mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah, sektor-sektor lain juga perlu untuk diperhatikan terutama sektor-sektor yang memiliki dampak multiplier yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Suatu sektor dikatakan merupakan sektor kunci apabila memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam menarik dan mendorong sektor lainnya dalam hal peningkatan output sektoral. Kemampuan ini tergambar dalam besaran Indeks Keterkaitan ke Belakang (Indeks *Backward Linkage* atau IBL) dan Indeks Keterkaitan ke Depan (Indeks *Forward Linkage* atau IFL) (Daryanto & Hafizrianda, 2010). Besaran nilai IBL dan IFL

Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 bisa diilustrasikan dalam bentuk sebuah grafik 4 kuadran yang bisa dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa sektor-sektor kunci pada perekonomian di Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 adalah sektor dengan kode C (Industri), kode D (Pengadaan Listrik dan Gas), kode F (Konstruksi), serta kode J (Informasi dan Komunikasi). Dari semua sektor kunci tersebut, terdapat sektor yang merupakan sektor penopang perekonomian di Hulu Sungai Utara yaitu sektor Konstruksi (dengan *share* 10,84 persen) serta sektor Industri yang memiliki *share* cukup besar pada tahun 2022 yaitu 9,22 persen (peringkat 6 *share* terbesar). Artinya, peningkatan permintaan akhir pada sektor Konstruksi dan Industri di Hulu Sungai Utara selain bisa menggerakkan perekonomian, juga mampu menarik dan mendorong sektor-sektor lain dalam hal peningkatan output di dalam perekonomian.

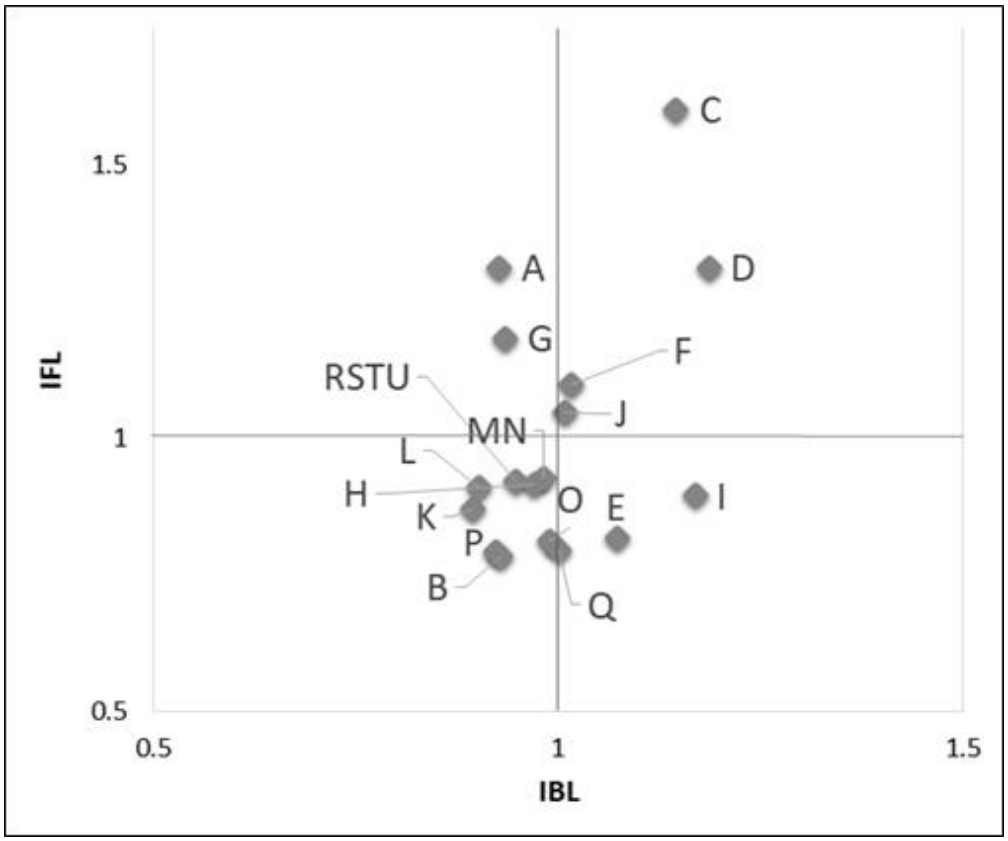

Sumber: Penghitungan penulis.

Gambar 2. IFL dan IBL 17 Sektor Perekonomian di Hulu Sungai Utara, 2022

Selain sektor kunci, perekonomian di Hulu Sungai Utara juga memiliki sektor-sektor yang berorientasi hulu (hanya IBL bernilai lebih dari 1) yaitu sektor dengan kode E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), kode I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kode Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial). Selain itu juga ada sektor-sektor berorientasi hilir (hanya IFL bernilai lebih dari 1) yaitu sektor dengan kode A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dan kode G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sisanya merupakan sektor-sektor yang memiliki nilai IBL dan IFL di bawah rata-rata sehingga tidak memiliki efek *multiplier* cukup signifikan.

Dampak Permintaan Akhir Terhadap Distribusi Pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peningkatan output maupun terjadinya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan akhir pada sektor penopang maupun sektor kunci merupakan cerminan meningkatnya kinerja perekonomian di suatu wilayah. Akan tetapi manfaat pertumbuhan

ekonomi yang tercermin salah satunya dari peningkatan pendapatan masih belum terjelaskan melalui analisis tabel input-output sederhana. Alat analisis yang bisa menggambarkan distribusi pendapatan akibat dari peningkatan permintaan akhir adalah tabel input-output Miyazawa. Gambaran distribusi pendapatan akibat dari peningkatan permintaan akhir di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa dijelaskan oleh matriks *Multiplier of Income Formation* atau matriks MIF yang merupakan matriks pada salah satu kuadran tabel input-output Miyazawa Hulu Sungai Utara tahun 2022. Adapun *share* komponen matriks MIF terhadap total kelompok pengeluaran (yang telah ditranspose) bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. *Share* Matriks MIF Hulu Sungai Utara Tahun 2022 yang Ditranspose

Sektor	Kelompok 40% Bawah	Kelompok 40% Menengah	Kelompok 20% Atas
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,89	5,81	5,46
B. Pertambangan dan Penggalian	4,07	4,67	4,48
C. Industri Pengolahan	7,95	5,46	5,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,35	4,33	7,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,71	7,47	3,51
F. Konstruksi	5,42	6,97	6,10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	7,27	7,65
H. Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,49	5,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,35	5,63	5,61
J. Informasi dan Komunikasi	8,20	7,97	3,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	4,16	5,64
L. Real Estat	4,99	5,58	6,23
MN. Jasa Perusahaan	3,90	10,64	5,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,29	4,15	8,24
P. Jasa Pendidikan	4,34	4,15	8,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,95	3,08	6,38
RSTU. Jasa lainnya	7,05	7,17	4,58
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**
***Share* Kelompok**	**12,83**	**38,63**	**48,54**

Sumber: Penghitungan penulis (2023)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jika terjadi kenaikan permintaan akhir di perekonomian Hulu Sungai Utara, maka masyarakat yang paling banyak menerima dampak pada peningkatan pendapatannya adalah golongan 20 persen atas, disusul 40 persen menengah, dan 40 persen bawah. Secara proporsi, 20 persen teratas menerima 48,54 persen, 40 persen menengah menerima 38,63 persen, dan 40 persen bawah menerima 12,83 persen manfaat. Jika mengacu pada klasifikasi Bank Dunia pada (BPS, 2023), proporsi ini menggambarkan tingkat ketimpangan sedang dimana golongan 40 persen terbawah menerima kisaran manfaat pada kisaran 12 - 17 persen. Jadi secara umum, perekonomian di Hulu Sungai Utara belum bisa dikatakan sepenuhnya inklusif jika perekonomian diintervensi secara merata di semua sektor pada permintaan akhirnya. Selain itu, pada golongan 40 persen bawah, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang memiliki *share* tertinggi (13,71 persen) diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10,89 persen) yang berarti bahwa sektor-sektor ini yang menyumbangkan efek distribusional tertinggi dibanding sektor lainnya jika terjadi peningkatan permintaan akhir secara merata di golongan pendapatan 40 persen bawah. Untuk golongan 40 persen menengah, sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor dengan *share* terbesar penerima pembentukan pendapatan yaitu 10,64 persen. Sedangkan untuk golongan 20 persen atas, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta sektor Jasa Pendidikan yang memiliki *share* terbesar masing-masing sebesar 8,24 dan 8,31 persen.

Analisis pada tabel input-output Miyazawa adalah analisis dampak kenaikan permintaan akhir sektoral pada distribusi pendapatan, artinya dalam menginterpretasi matriks MIF, selain mengamati *share* terhadap total golongan juga bisa dilakukan analisis *share* terhadap total tiap sektor. Jika digambarkan dalam bentuk grafik dan diurutkan besaran *share* per baris/sektornya, maka bisa dilihat dampak sektoral terhadap distribusi pendapatan yang bisa dilihat pada Gambar 3.

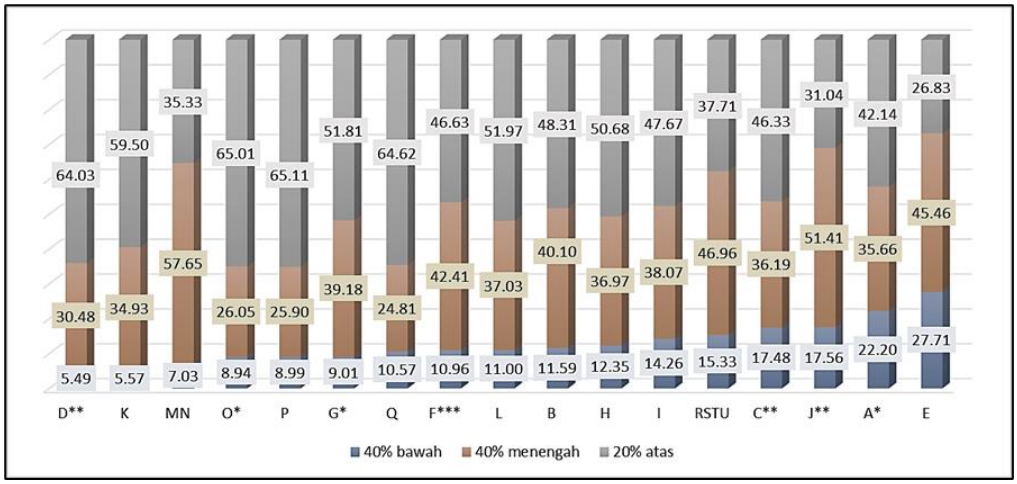

Sumber: Penghitungan penulis (2023

Keterangan: * sektor penopang, ** sektor kunci, *** sektor penopang sekaligus kunci

Gambar 3. *Share* Sektoral Elemen Matriks MIF Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022 (Persen)

Jika mengacu pada klasifikasi Bank Dunia, Gambar 3 menunjukkan bahwa distribusi dampak peningkatan pendapatan akan menghasilkan ketimpangan rendah (golongan 40% bawah menerima manfaat di atas 17 persen) jika permintaan akhir ditingkatkan pada sektor dengan kode E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), sektor penopang dengan kode A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), sektor kunci dengan kode J (Informasi dan Komunikasi), dan sektor kunci dengan kode C (Industri Pengolahan). Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Hulu Sungai Utara bisa dilakukan dengan meningkatkan (misalnya) investasi pada sektor-sektor tersebut. Terlebih lagi, terdapat sektor A yang merupakan sektor penopang perekonomian serta sektor C dan J yang merupakan sektor kunci di Hulu Sungai Utara (sektor-sektor dengan dampak pertumbuhan dan efek berantai yang tinggi). Beberapa hal yang bisa diusahakan dalam rangka peningkatan permintaan akhir terkait sektor-sektor dengan dampak inklusif diantaranya adalah: pengembangan bank sampah atau usaha daur ulang, subsidi pupuk, kredit pertanian, perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan, peningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi untuk bisnis, dan terus mendukung dalam pengembangan inovasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penopang perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun

kontribusi sektor-sektor ini terhadap perekonomian menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran struktural dalam ekonomi daerah atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut dalam menghadapi persaingan dan keberlanjutan sektor itu sendiri.

Adapun sektor yang berperan sebagai sektor kunci adalah sektor Industri, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini menandakan bahwa terdapat diversifikasi ekonomi yang lebih luas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diversifikasi ini penting sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi di pasar domestik, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, dapat diketahui pula bahwa ketika terjadi kenaikan permintaan akhir, manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung lebih banyak dirasakan oleh kelompok 20 persen teratas, diikuti oleh kelompok 40 persen menengah, dan terakhir kelompok 40 persen terendah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya inklusif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hal tersebut berupa pengembangan dan pembangunan sektor-sektor ekonomi yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Informasi dan Komunikasi; dan Industri Pengolahan yang mampu mendorong terwujudnya perekonomian yang inklusif di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adyaharjanti, A., & Hartono, D. (2020). Dampak Pengeluaran Wisatawan Mancanegara terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 33. https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i01.p02

Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi antar Provinsi di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies, 1*(1).

Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *5*(1), 1–12.

Agénor, P. (2017). Caught in The Middle? The Economics of Middle-Income Traps. *Journal of Economic Surveys*, *31*(3), 771–791. https://doi.org/10.1111/joes.12175

Alberti, T. M., de Souza, K., & Porsse, A. (2023). Poverty and The Functional Distribution of Income In The Input–Output Framework: In Pursuit of Strategies for Inclusive Growth. *Economic Systems Research*, *35*(4), 614–633. https://doi.org/10.1080/09535314.2022.2067029

Alekhina, V., & Ganelli, G. (2023). Determinants of inclusive growth in ASEAN. *Journal of the Asia Pacific Economy*, *28*(3), 1196–1228.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel Input - Output Indonesia 2016*. https://www.bps.go.id/id/publication/2021/03/31/081f6b0af2c15c524d72b660/tabel-input---output-indonesia-2016.html

Badan Pusat Statistik. (2023). *Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html

BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023a). *Distribusi PDRB Harga Berlaku, 2010-2022*. https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/indicator/52/201/1/distribusi-pdrb-harga-berlaku.html

BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023b). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022* (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ed.). BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023c). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut Lapangan Usaha 2018 - 2022* (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ed.). BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2023a). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020), 2021-2023.* https://kalsel.bps.go.id/indicator/26/356/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha 2018 - 2022* (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Ed.). BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2010). *Analisis Input-Output & Social Accounting Matrix.* IPB (Bogor Agricultural University).

Dimas, P. A., & Neli, A. (2022). Inclusive Growth Analysis in Central Sulawesi, The Eastern Province of Indonesia 2015-2019. *Asian Journal of Business Environment*, *12*(2), 1–12. https://doi.org/10.13106/AJBE.2022.VOL12.NO2.1

Doumbia, D. (2019). The Quest for Pro-Poor and Inclusive Growth: The Role of Governance. *Applied Economics*, *51*(16), 1762–1783. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1529392

Dyah Hapsari, S. A., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, *2*(2), 85–112. https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.2013.85-112

Edinak, E. A., Sayapova, A. R., & Shirov, A. A. (2022). Endogenization of Household Consumption in The Expanded Input–Output Model. *Studies on Russian Economic Development*, *33*(1), 1–10. https://doi.org/10.1134/S1075700722010063

Hardiwan, D., Amir, A., Junaidi, J., & Delis, A. (2019). The Linkages and Impact of Plantation-Based Sectors on Economy and Poverty in Jambi Province, Indonesia: Miyazawa's Input-Output Model. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, *5*(3), 5–19. https://doi.org/10.51599/are.2019.05.03.01

Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The determinants of inclusive economic growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia*, *16*(2), 200–210.

Imansyah, M. H., Hartono, D., & Putranti, T. (2023). The Impacts of Digital Economy on Green Economy: The Indonesian Miyazawa Model. *Polish Journal of Environmental Studies*, *32*(2).

Iskandar, A. (2016). Pertumbuhan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal BPPK*, *9*.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions.* Cambridge university press.

Miyazawa, K. (1968). Input-Output Analysis and Interrelational Income Multiplier as a Matrix. *Hitotsubashi Journal of Economics*, *8*(2), 39–58. https://EconPapers.repec.org/RePEc:hit:hitjec:v:8:y:1968:i:2:p:39-58

Murjani, A. (2019). Short-run and Long-run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *2*(1), 15–29. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29

Nehemia, S. D., & Prasetyia, F. (2023). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *2*(1), 26–37.

Purwanti, S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, *4*(1), 32–44. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231

Saari, M. Y., Dietzenbacher, E., & Los, B. (2014). Income Distribution across Ethnic Groups in Malaysia: Results from a New Social Accounting Matrix. *Asian Economic Journal*, *28*(3), 259–278.

Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1), 79–92. https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74

Sternfels, B. (2021). *The Case for Inclusive Growth*. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/resilience-for-sustainable-inclusive-growth

Varsha Pramod, P., & Ramachandran, R. (2023). Youth employment for inclusive growth: a review and research agenda in global perspective with special reference to India. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, *13*(1), 9. https://doi.org/10.1007/s40497-023-00354-4